

JURNAL KEPENDUDUKAN INDONESIA

p-ISSN : 1907-2902 (Print)

e-ISSN : 2502-8537 (Online)

TRAPPED POPULATIONS: MENANGANI PANDEMI COVID-19 UNTUK PENYINTAS BENCANA DI KOTA PALU

(TRAPPED POPULATIONS: MANAGING COVID-19 PANDEMIC FOR DISASTER SURVIVORS IN PALU CITY)

Abdul Fikri Angga Reksa

Pusat Penelitian Kewilayahan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Korespondensi penulis: fikrianggareksa@gmail.com

Abstract

This article depicts the disaster survivors' recent situation amidst the COVID-19 crisis in Palu City (Central Sulawesi). Even though multiple disasters occurred around two years ago, there are still many people living in temporary shelters. They could not apply a health protocol recommendation such as physical distancing due to densely populated setting. Apart from that, they could not access a proper WASH facility in the evacuation camps. The coronavirus outbreak has been undermining the temporary shelters' dwellers hardly. Most of them are trapped or unable to move to a safe place, albeit they want to do it so. The local government has anticipated the worst-case scenario through direct assistance and stimulus programs. However, those ongoing programs are inadequate to reach the whole communities in need. In order to manage the COVID-19 pandemic, this article suggests people empowering approach by harnessing the existing social capital, for instance, social network and community-based initiatives. Learning from the tragedy on 28 September 2018, the community-based initiatives focus on providing basic needs (food, sanitizer, mask) and mental health support.

Keywords: *trapped populations, COVID-19, Palu*

PENYINTAS BENCANA DAN COVID-19

Belum usai duka masyarakat Kota Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), akibat gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi yang menerpa pada 28 September 2018. Kini masyarakat harus menghadapi ancaman baru berupa pandemi COVID-19. Sampai 7 Juni 2020, Dinas Kesehatan Provinsi Sulteng mencatat sebanyak 35 pasien terkonfirmasi COVID-19 dengan rincian 16 orang dinyatakan sembuh, 16 orang masih menjalani perawatan, dan 3 orang lainnya meninggal dunia.

Secara statistik, jumlah pasien terkonfirmasi COVID-19 di Kota Palu memang terbilang rendah. Namun, pemerintah setempat sangat perlu meningkatkan kewaspadaan. Banyaknya penyintas bencana alam yang masih tinggal di tenda darurat dan hunian sementara

(huntara) menjadi alasan kuat betapa pentingnya langkah-langkah pencegahan penyebaran virus SARS-CoV-2 di wilayah berisiko tinggi tersebut. Apabila tidak ditangani dengan serius, area huntara dan tenda darurat bisa menjadi kluster penyebaran COVID-19 yang sangat masif.

Di ranah global, para pakar mengklasifikan kamp pengungsi baik yang disebabkan oleh konflik maupun bencana alam sebagai 'hotspots' penyebaran COVID-19 (Meer, 2020). Raju dan Ayeb-Karlsson (2020) juga mengklasifikasikan permukiman informal dan kawasan perkampungan kumuh perkotaan sebagai wilayah yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam penanganan COVID-19 di samping kamp pengungsi. Terbukti, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mengonfirmasi dua kasus pertama COVID-19 di tenda

pengungsian Cox's Bazar, Bangladesh yang mengakibatkan ribuan penghuni kamp pengungsi Rohingya tersebut berada dalam pengawasan ketat (Ratcliffe & Ahmed, 2020). Pola penyebaran COVID-19 serupa mungkin saja terjadi di tenda-tenda pengungsian di Palu yang padat penduduk.

Trapped populations didefinisikan sebagai ketidakmampuan individu atau kelompok untuk berpindah dari lingkungan yang berisiko tinggi meskipun mereka mengharapkannya (Foresight, 2011). Terminologi tersebut mengilustrasikan kerentanan masyarakat yang secara geografis terjebak atau terpaksa menetap akibat dampak buruk krisis iklim. Lebih lanjut, *trapped populations* juga menjelaskan kondisi kelompok masyarakat yang tidak bisa berpindah lantaran berbagai faktor misalnya hambatan sosial, ekonomi, politik, dan budaya (Black & Collyer, 2014; Humble, 2014; Nawrotzki & DeWaard, 2017). Meski begitu, penggunaan istilah *trapped populations* perlu ditinjau lebih lanjut terkait implikasi penggunaan label '*trapped*' yang dinilai dapat melemahkan atau bahkan menghilangkan kapasitas individu untuk memutuskan nasibnya sendiri (Ayeb-Karlsson dkk., 2018).

Dalam konteks masyarakat Palu, mereka yang tinggal di tenda darurat dan huntara dapat dikategorikan sebagai *trapped populations*. Walaupun bencana dahsyat sudah terjadi dua tahun silam, organisasi *Sulteng Bergerak* menyebut masih ada ribuan penyintas tinggal di tenda darurat. Area tenda darurat tersebut tersebar di beberapa kelurahan seperti Talise, Tondo, Pantoloan, Duyu, Petobo, Balara, dan Tawaeli. Banyak di antara mereka hidup dalam ketidakpastian terkait hunian tetap (huntara), finansial, hingga kebutuhan pokok. Bahkan masih ada kelompok masyarakat yang mengandalkan bantuan atau donasi untuk sekadar memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka harus bertahan di tempat dengan fasilitas terbatas karena tidak memiliki aset untuk berpindah ke tempat yang lebih layak.

Masuknya pandemi COVID-19 semakin memperparah kerentanan masyarakat di tenda darurat. Apalagi tenda darurat dan huntara di Kota Palu masih belum dilengkapi dengan fasilitas air bersih, sanitasi, dan kebersihan (WASH) yang memadai. Di samping itu, luas tenda darurat dan huntara mayoritas hanya berukuran 4x5 meter dan rata-rata dihuni oleh 2 sampai 7 anggota keluarga (NGO1, komunikasi personal, 30

Mei 2020). Anjuran yang dicanangkan WHO menjadi tidak relevan untuk penyintas bencana. Sebagai contoh kampanye program #DiRumahAja atau #StayAtHome tidak bisa diimplementasikan karena memang penyintas tidak memiliki rumah.

Hal tersebut juga berimplikasi pada anjuran dari (WHO) lainnya seperti pembatasan sosial dan imbauan mencuci tangan yang sulit dipenuhi. Ini menunjukkan bahwa anjuran yang dicanangkan hanya bisa diimplementasikan untuk masyarakat yang memiliki privilese, bukan untuk masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus di Palu.

Untuk mencegah penyebaran yang lebih luas di kawasan tenda darurat, beberapa langkah antisipasi telah dilakukan. Pemprov Sulteng menutup Bandara Mutiara SIS Al-Jufri, Palu hingga 1 Juni 2020. Upaya tersebut dilakukan karena Kota Palu merupakan gerbang utama ke kota-kota lain di Provinsi Sulteng. Selain itu, pemerintah menerapkan serangkaian langkah pencegahan untuk masyarakat di tenda darurat selama masa pandemi seperti penyemprotan disinfektan dan penambahan fasilitas cuci tangan di depan pintu masuk kamp pengungsian.

Beberapa organisasi kemanusiaan internasional memberikan penanganan khusus untuk para lansia yang masih tinggal di huntara. Pemerintah juga memberikan bantuan langsung tunai (BLT) dan kebutuhan bahan pokok. Akan tetapi, inisiatif tersebut menuai kritik tajam karena lemahnya kontrol pemerintah dalam melindungi kelompok rentan serta tidak meratanya distribusi BLT dan bahan pokok (NGO2, komunikasi personal, 30 Mei 2020).

Parks (2020) menegaskan pentingnya modal sosial untuk meminimalisasi dampak negatif pandemi COVID-19. Fakta bahwa ada kelompok masyarakat yang lebih rentan daripada kelompok lainnya, menjadikan kekerabatan dan/atau solidaritas antarmasyarakat menjadi krusial. Berkaca dari tragedi *triple disasters* 2018, bentuk modal sosial seperti jaringan sosial, kepercayaan pada tokoh masyarakat, dan penanganan berbasis masyarakat berkontribusi pada proses rehabilitasi dan pemulihan pascabencana (Reksa & Neise, 2019). Karena itu, penguatan modal sosial di tengah masyarakat dipercaya dapat mencegah keruntuhan yang lebih parah pada masa pandemi COVID-19 di wilayah rentan.

Masyarakat berperan penting dalam usaha mencegah penyebaran COVID-19 di kamp pengungsian. Organisasi non-profit yang dikelola pegiat seni, Forum Sudut Pandang dan Institut Mosintuwu (Poso) menunjukkan solidaritasnya dengan menggelar “Masak untuk Kawan”. Program ini bertujuan menyediakan stok makanan matang untuk siapa saja yang membutuhkan di area Palu dan sekitarnya, termasuk masyarakat di kamp pengungsi. Hingga sekarang, krisis pangan untuk masyarakat yang berada di tenda darurat masih sering terjadi. Terlebih, sebagian besar penghuni huntara dan tenda pengungsian mayoritas berprofesi sebagai buruh harian lepas. Menyebarnya COVID-19 di Palu, membuat beberapa orang harus kehilangan mata pencahariannya.

Permasalahan sanitasi dan kesehatan paling sering dijumpai dalam kamp pengungsi untuk penyintas bencana (Raju & Ayeb-Karlsson, 2020). Salah satu inisiatif masyarakat dalam penyediaan akses kebersihan misalnya dilakukan oleh Komunitas Sikola Pomore bekerja sama dengan SMK Muhammadiyah Palu. Mereka memproduksi *hand sanitizer* secara mandiri untuk dibagikan kepada penyintas bencana yang tinggal di tenda darurat. Beberapa komunitas juga membagikan masker kain gratis untuk masyarakat di tenda darurat. Hal itu dilakukan lantaran semakin langkanya *hand sanitizer* dan masker di pasaran.

Aksi penggalangan dana juga marak dilakukan oleh beberapa komunitas untuk masyarakat di tenda darurat yang kehilangan pekerjaan akibat dari pandemi. Berbagai inisiatif komunitas tersebut banyak berkaca dari pengalaman menghadapi bencana sebelumnya. Mereka lebih memfokuskan penggalangan dana untuk pemenuhan kebutuhan dasar makanan, pendidikan dan sosialisasi protokol kesehatan, serta perlengkapan kesehatan (NGO1, komunikasi personal, 30 Mei 2020). Tidak hanya itu, upaya konseling untuk masyarakat juga masih terus digiatkan mengingat masih banyaknya penyintas yang masih trauma.

KESIMPULAN

Tidak bisa dimungkiri, pemberlakuan protokol kesehatan seperti pembatasan sosial menjadi sesuatu yang disebut ‘*a physical impossibility*’ (Iacobucci,

2020). Karena itu untuk menangani penyebaran COVID-19 di Palu dibutuhkan alternatif solusi yang lebih dari sekadar pemberlakuan peraturan normatif yang sudah ada. Namun, akselerasi pemenuhan akses kebutuhan perumahan dan fasilitas WASH mutlak dibutuhkan bagi penyintas bencana terutama mereka yang termasuk dalam kelompok rentan seperti lansia dan anak-anak. Selain itu, kesehatan mental dan rasa aman para penyintas juga patut menjadi prioritas utama (Sieffien dkk., 2020). Terlebih di tenda darurat Palu telah banyak beredar kabar tentang pelecehan seksual yang dialami perempuan di huntara.

Kemunculan berbagai kritik dalam penanganan COVID-19 oleh pemerintah, membuat masyarakat harus lebih saling menjaga di tengah ketidakpastian perihal pandemi. Langkah konkret komunitas berbasis masyarakat yang telah dilaksanakan, terbukti mengurangi tekanan beban hidup mereka yang tinggal di tenda darurat untuk sementara waktu. Peran tokoh masyarakat atau tokoh adat dibutuhkan dalam implementasi kebijakan, informasi dan sosialisasi, serta meningkatkan solidaritas di tingkat akar rumput (gotong royong). Peran pemerintah sangat krusial terutama dalam menyiapkan bantuan finansial, menjamin ketersediaan kebutuhan dasar, hingga kesiapsiagaan dalam menghadapi skenario terburuk.

Sebagai penutup, artikel ini berkontribusi dalam memberikan ilustrasi awal mengenai kondisi *trapped populations* penyintas bencana di Kota Palu. Namun, artikel ini belum mengulas secara komprehensif relasi pemerintah dan masyarakat rentan beserta inisiatif yang sudah dilakukan. Oleh karena itu penelitian lebih lanjut dibutuhkan untuk mengetahui gambaran lengkap yang terjadi pada *trapped populations* pada masa pandemi COVID-19.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Indian Ocean Partnership (IOP) dan The Social Sciences and Humanities Research Council of Canada (SSHRC). Terima kasih tak terhingga untuk rekan-rekan di Palu dan Sigi yang berkontribusi besar dalam penulisan artikel singkat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayeb-Karlsson, S., Smith, C. D., & Kniveton, D. (2018). A discursive review of the textual use of 'trapped' in environmental migration studies: The conceptual birth and troubled teenage years of trapped populations. *Ambio*, 47(5), 557-573. <https://doi.org/10.1007/s13280-017-1007-6>.
- Black, R., & Collyer, M. (2014). Populations 'trapped' at times of crisis. *Forced Migration Review*, 45, 52-56. <https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:a605ba61-f2a1-4c92-81b0-92a5a33eb32e>.
- Dinkes Provinsi Sulteng.(2020, Juni 7). Situasi COVID-19; Update 7 Juni 2020. <https://dinkes.sultengprov.go.id/update-07-juni-2020/>
- Foresight (2011). Migration and global environmental change: Future challenges and opportunities. Final Project Report. London: The Government Office of Science.
- Humble, A. T. (2014). The rise of trapped populations. *Forced Migration Review*, 45, 56-57. <https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:a605ba61-f2a1-4c92-81b0-92a5a33eb32e>.
- Iacobucci, G. (2020). Covid-19: Doctors warn of humanitarian catastrophe at Europe's largest refugee camp. <https://doi.org/10.1136/bmj.m1097>.
- Meer, N. (2020, April 21). Overcrowded refugee camps risk Covid-19 tragedy. The University of Edinburgh. <https://www.ed.ac.uk/covid-19-response/expert-insights/overcrowded-refugee-camps-risk-covid-19>.
- Nawrotzki, R. J., & DeWaard, J. (2018). Putting trapped populations into place: Climate change and inter-district migration flows in Zambia. *Regional environmental change*, 18(2), 533-546. <https://doi.org/10.1007/s10113-017-1224-3>.
- Parks, V. (2020) The Critical Role of Social Capital During the COVID-19 Pandemic: Lessons from Disaster Research. *Population Briefs*. 2. https://egrove.olemiss.edu/population_brief/2.
- Raju, E., & Ayeb-Karlsson, S. (2020). COVID-19: How do you self-isolate in a refugee camp?. *International Journal of Public Health*, 1. <https://doi.org/10.1007/s00038-020-01381-8>.
- Ratcliffe, R., & Ahmed, R. (2020, May 15). Fears Rohingya refugees face disaster after Covid-19 reaches Cox's Bazar. The Guardian. <https://www.theguardian.com/world/2020/may/15/fears-rohingya-refugees-face-disaster-after-covid-19-reaches-coxs-bazar>.
- Reksa, A.F.A, & Neise, T. (2020) Wiederaufbau und Überleben. Palu auf Sulawesi ein Jahr nach dem Erdbeben. *Geographische Rundschau* 71(12):46-49. <https://www.westermann.de/anlage/4618357/Wiederaufbau-und-Ueberleben-Palu-auf-Sulawesi-ein-Jahr-nach-dem-Erdbeben>.
- Sieffien, W., Law, S., & Andermann, L. (2020). Immigrant and refugee mental health during the COVID-19 pandemic: Additional key considerations. *Canadian Family Physician*. <https://www.cfp.ca/news/2020/06/23/06-23-1>